

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan pendekatan analisis, yaitu penelitian dengan menganalisa bagaimana pengaruh dan implementasi Otonomi Khusus bagi orang asli Papua dalam kepemilikan lapak di Pasar Wosi Manokwari tanpa mengabaikan kepentingan warga pendatang. Selain itu, pendekatan yang dilakukan juga dengan metode wawancara dengan mereka yang dianggap memiliki kapasitas seperti (Bupati, MRPB, Biro Otonomi Khusus Papua Barat, Dinas Perindakop, Kepala Pengawasan Pasar, Pedagang pendatang, dan Pedagang OAP) untuk membantu dalam menganalisa kurang berjalanya penerapan otonomi khusus bagi orang asli Papua di Kabupaten Manokwari dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sehingga terjadi persaingan yang sehat antara Orang Asli Papua dan warga pendatang dalam menjalankan roda perekonomian di Kabupaten Manokwari. Dan juga gejala konflik sosial yang terjadi di pasar Wosi antara pedagang, penguasa di pasar Wosi dan pemerintah daerah.

Selain itu, pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, penjangkangan (Eksploitatif), bersifat terbuka masih mencari – cari persoalan mengenai Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua barat dalam kepemilikan lapak dagang di pasar Wosi Kabupaten Manokwari dan apa yang perlu dikaji dan diteliti. Misalnya, hal penting apa yang mencemaskan dari implementasi Otonomi Khusus, lalu bagaimana supaya proses pelaksanaan Otonomi Khusus ini sesuai target dan sasaran di kabupaten Manokwari *Kedua*, Deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang tepat dan cermat terhadap fenomena sosial yang terjadi akibat dampak dari Implementasi Otonomi Khusus Papua Barat. Terhadap kepemilikan lapak dagang di pasar Wosi kabupaten Manokwari. *Ketiga*, Penjelasan, apabila untuk data yang sama atau

ketika ada beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan tentang fenomena sosial yang sama, maka penelitian tersebut bukanlah dikatakan sebagai penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesa atau penelitian penjelasan.

Keempat. adalah Evaluasi, Disini yang menjadi pertanyaan pokok adalah samapai berapa jauh tujuan yang digriskan pada awal targetan dari penelitian ini tercapai. Pada dasarnya Evaluasi ini mencakup dua hal yaitu *Pertama Evaluasi Formatif* evaluasi ini bertujuan untuk melihat dan meneliti pelaksanaan dari suatu program Otonomi Khusus serta mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program dari Otonomi Khusus tersebut. Yang *kedua* adalah *Evaluasi Sumatif*. Evaluasi biasanya dilakukan pada akhir program untuk mengukur apakah selama diberlakukanya Undang – Undang Otonomi Khusus hingga saat ini menaikan taraf hidup masyarakat Papua atau tidak.

Yang ke *Lima.* Prediksi. Hasil penelitian dapat digunakan juga untuk mengadakan prediksi mengenai fenomena tertentu dari Pelaksanaan Politik Desentralisasi, berhubung pada tahun 2001 mengingat Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Papua. Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan Prediksi, akan memudahkan peneliti untuk memberikan suatu rujukan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan mengenai masa berakhirnya Otonomi Khusus.¹

2.2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam melakukan penelitian dan penilaian terhadap implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat adalah terkhususnya dampak Otonomi Khusus bagi pengembangan dan pemberdayaan Orang Asli Papua warga Pendatang adalah dengan menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Kualitatif.

¹ Masri Singarimbun.,*Metode Penelitian Survei*.,LP3ES 2006.,Hal 4-5

2.3. Teknik pengumpulan data.

Dalam rangka melakukan penelitian mengenai fenomena sosial yang terjadi antara tiga kategori tersebut diatas, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian mengenai implikasi penerapan Otonomi Khusus dengan cara wawancara beberapa tokoh yang dinilai memiliki kapasitas dalam memberikan suatu jawaban ataupun penilaian mengenai dampak negatif dan positif dari implementasi otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. Tokoh – tokoh yang dimaksud adalah Biro Otsus Provinsi Papua Barat, Bupati Manokari, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRPB), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan. Selain Wawancara, teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah dengan melakukan pengamatan.

2.4. Pedoman Wawancara

Wawancara biasa di katakan sebagai suatu percakapan yang merujuk pada pertanyaan – pertanyaan dan jawaban yang di berikan. Dalam bahasa umum wawancara mengacu pada percakapan satu – satu antara pewawancara dan orang yang di wawancarai sehingga informasi yang di dapatkan bisa menjadi suatu bahan kajian yang bisa di pertanggung jawabkan keasliannya secara ilmiah dan sistematis.

Dalam konteks ini, pedoman wawancara yang penulis rumuskan untuk menjadi suatu bahan pertanyaan dalam melihat dan menilai kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dalam menerapkan otonomi khusus provinsi Papua Barat dalam kepemilikan lapak di dagang di pasar wosi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

No	Pertanyaan Wawancara	Topik Pertanyaan	Informan
1.	Bagaimana rencana tata kelola ruang publik di Manokwari, terkhususnya di Pasar Wosi?	Tata kelola Ruang Publik	Bupati Manokwari
1	Bagaimana proses implementasi Undang – undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat?	Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	Ketua Majelis Rakyat Papua Barat
2	Bagaimana penerapan Otonomi Khusus Papua Barat dalam memberdayakan orang asli Papua di Provinsi Papua Barat?	Penerapan Otonomi Khusus Papua Barat	Biro Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
3	Bagaimana Tata kelola Pasar Wosi Kabupaten Manokwari	Pasar Wosi	Kepala Dinas UMKM dan Perindakop Kabupaten Manokwari
4	Bagaimana Fasilitas pedagang di Pasar Wosi Kabupaten Manokwari	Fasilitas Pasar Wosi	Pedagang pendatang Pasar Wosi Kabupaten Manokwari
5	Bagaimana Kondisi yang di hadapi oleh mama – mama Papua di pasar Wosi Kabupaten Manokwari	Kondisi Pedagang asli Papua di Pasar Wosi	Pedagang pendatang di Pasar Wosi
6	Apakah Otonomi Khusus Bermanfaat bagi orang asli Papua dalam sektor Perekonomian dan perdagangan	Manfaat Otonomi Khusus Papua Barat	Pedagang orang asli Papua di Pasar Wosi

7	Bagaimana kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dalam mengelolah Otonomi Khusus dalam sektor Perdagangan	Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari	Pedagang orang asli Papua di Pasar Wosi
8	Bagaimana kinerja otonomi khusus terhadap mama – mama Papua di Kabupaten Manokwari	Kinerja Otonomi Khusus Papua Barat	Aktivis Perempuan di kabupaten Manokwari
9	Bagaimana relasi lembaga legislatif dan eksekutif dalam mealaksanakan amanat Undang – Undang otsus Papua Barat	Relasi kekuasaan dalam pembuatan kebijakan	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat

Tabel 1. *Pedoman Wawancara*

2.5. Teknik pengolahan Data

Pengolahan data kualitatif dalam penelitian mengenai Implikasi penerapan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat terhadap kepemilikan lapak dagang di pasar Wosi Kabupaten Manokwari adalah dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan perolehan data dari berbagai lembaga yang dinilai bertanggung jawab dalam menjalankan serta membuat suatu aturan yang tidak menimbulkan konflik sosial di Provinsi Papua Barat terkhususnya Kabupaten Manokwari. Lembaga – lembaga yang dimaksud adalah Pemerintah daerah sebagai Eksekutor dari Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai Lembaga Legislatif yang merepresentasikan Orang Papua dalam proses pembuatan regulasi yang melindungi hak orang Papua. Tokoh Masyarakat merupakan mereka merasakan secara langsung kebijakan dan pelayanan publik dengan

menggunakan dana Otsus. Serta, merasakan secara langsung konflik sosial yang terjadi di tengah – tengah masyarakat.

Dalam study kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik dalam prosedur – prosedur rutin mealui saluran – saluran birokrasi atau Aparatur Sipil Negara, melainkan implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, pengambilan keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses politik.

Oleh karena itu, suatu kebijakan pada umumnya akan senantiasa ditransformasikan melalui tindakan implementasi sehingga secara berkesinambungan mengubah sumber – sumber dan tujuan . dengan demikian, bukan hanya sekedar merancang bangunan kebijakan akan tetapi lebih kepada merancang bangunan kebijakan sepanjang masa dan berkelanjutan²



² Dr.H.Muhamad Ridha Suib, S.E.,M.Si.,M.M.,M.H.,*Pengantar Kebijakan Publik dari Administrasi Negara, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance,Hingga Implementasi Kebijakan.*,Caplus 2016.Hal.80-83.